

UPAYA WALHI KALIMANTAN SELATAN DALAM MEMPERJUANGKAN KELESTARIAN KARST PEGUNUNGAN MERATUS

Siti Hamidah ^{1*}, Muhammad Nizar Hidayat ²

¹ Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Bridgen Hasan Basry, Banajrmasin, Indonesia

² Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Bridgen Hasan Basry, Banajrmasin, Indonesia

* Penulis korespondensi: sitihamidah.fisip@unlam.ac.id

Abstrak. Rencana pembukaan tambang batu bara Karst Gunung Meratus yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia memicu LSM lokal, yaitu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalimantan Selatan, untuk menentang komersialisasi dan eksploitasi kawasan karst. Disini terletak fokus penelitian yang menarik untuk melihat dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh WALHI dalam memperjuangkan kelestarian Karst Pegunungan Meratus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana WALHI Kalimantan Selatan melakukan upaya dan cara untuk melindungi kawasan karst pegunungan Meratus dan analisis faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengadopsi cara tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan merupakan gabungan dari desk research dan field research. Beberapa strategi yang dapat diidentifikasi sebagai instrumen WALHI dalam memperjuangkan kelestarian kawasan Karst Meratus, yakni: Upaya Hukum, Melakukan Diseminasi Kajian serta Sosialisasi dan Unjuk Rasa. WALHI dalam aksinya tidak berjalan sendiri, namun turut pula mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Karst Kalsel (AMPK).

Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Politik, Kelestarian Lingkungan. Meratus, Gunung Karst

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu penting yang mencuat di fora internasional adalah tentang isu degradasi lingkungan. Perubahan iklim yang ekstrem sampai pada hilangnya sumber penghidupan manusia ditengarai menjadi akibat dari degradasi lingkungan yang sedemikian masif melanda dunia. Kapitalisme dan sistem internasional yang anarkis dituding menjadi penyebab dari fenomena global ini. Untuk itu isu degradasi lingkungan menjadi fokus dari serangkaian kesepakatan internasional terkait dengan regulasi dan komitmen dunia internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Sebagaimana dalam hubungan internasional, isu degradasi lingkungan berkaitan erat dengan banyak aktor yang memiliki kepentingan masing-masing. Terdapat perkelindanan antara Negara dan korporasi dalam hal eksploitasi alam, namun di satu sisi ada juga aktor-aktor yang memperjuangkan kelestarian lingkungan seperti non-governmental organization (NGO)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk itulah dalam mencermati dinamika yang terjadi dalam isu degradasi lingkungan global kita tidak bisa lagi membatasi diri untuk hanya meletakkan perhatian pada perilaku Negara dan korporasi, namun yang lebih penting justru adalah mencermati pergulatan yang dilakukan oleh aktor non Negara, dalam konteks ini adalah LSM dalam mempengaruhi jalannya kontestasi narasi terkait dengan isu lingkungan ini (Betsill & Corel, 2008:4).

Mengapa peran dan posisi LSM begitu penting dalam isu degradasi lingkungan? Hal ini karena aktor inilah yang sedari awal berjuang untuk mengangkat isu degradasi lingkungan sebagai isu pada arus utama hubungan internasional di tengah-tengah isu tradisional lain seperti isu konflik antar Negara, isu ekonomi dan geopolitik. Aktivitas LSM yang secara konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan dari ancaman eksploitasi dan degradasi juga menjadi acuan bagi beberapa rangkaian kesepakatan global terkait dengan kerjasama di tingkat internasional untuk mengatasi permasalahan ini, sebutlah seperti Konferensi Rio De Janeiro dan lain sebagainya.

Mereka juga sangat aktif dalam kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan, seringkali tidak sejalan dengan kebijakan nasional negara-negara yang ingin mengamankan kepentingan ekonomi mereka. Konflik sering terjadi, tetapi dalam beberapa kasus, LSM dan lembaga pemerintah dapat bekerja sama untuk mengatasi degradasi lingkungan. Dinamika politik dan ketegangan antar pemangku kepentingan dalam isu lingkungan menentukan bagaimana pengelolaan lingkungan dilakukan, mengarah pada agenda kelestarian lingkungan yang akan menjadi pedoman standar.

Seperti yang terjadi dalam skala global dan nasional, hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Selatan, Indonesia, mengelola ekosistem Karst Pegunungan Meratus yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara umum, karst merupakan kawasan dengan bentang alam dan pola hidrologi yang luar biasa yang terbentuk dari kombinasi sifat batuan dengan kelarutan tinggi dan porositas sekunder yang berkembang dengan

baik (Paripurno 2017). Tiga unsur utama pembentuk karst: batuan terlarut, proses pelarutan, dan susunan hidrologi yang dikenal dengan istilah “drainase” (P3EK, 2016). Ekosistem Karst terdiri dari bagian-bagian yang unik dan sensitif terhadap kerusakan lingkungan di sungai bawah tanah, gua, dan bagian epikarst. Bagian-bagian yang unik dan rentan ini membuat Ekosistem Karst perlu dilindungi dan fungsi lingkungan lainnya.

Salah satu kawasan karst yang paling banyak dibicarakan dalam wacana ekologi politik dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan adalah kawasan karst pegunungan Meratus. Meratus adalah daerah pegunungan yang terletak di sebelah tenggara pulau Kalimantan dan membagi provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua. Pegunungan ini membentang ± 600 km² dari barat daya-timur laut dan membelok ke utara ke provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pemerintah pusat dan provinsi harus melindungi kawasan karst pegunungan Meratus yang memiliki nilai ekologi, budaya, ekonomi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, Pemprov Kalsel telah mengeluarkan izin usaha besar-besaran untuk beroperasi di kawasan tersebut. Hal ini memicu reaksi dari berbagai kalangan masyarakat dan LSM lokal untuk menentang komersialisasi dan eksploitasi kawasan karst pegunungan Meratus. Salah satunya adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Mereka berpendapat bahwa pemanfaatan karst gunung Meratus akan membawa bencana besar baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

Apa yang terjadi di Kalsel mencerminkan fenomena global dimana kerentanan lingkungan harus menghadapi tuntutan laju perekonomian. Pemerintah Kalsel berpendapat bahwa penerbitan berbagai izin tersebut bertujuan untuk mendorong perekonomian dan memenuhi kebutuhan nasional, khususnya dalam hal pengembangan pertambangan batu bara. Sementara itu, para penggiat lingkungan selalu menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan dapat terlindungi.

Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana LSM melakukan upaya untuk melindungi kawasan karst pegunungan Meratus dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka untuk mengadopsinya. Hal ini menarik karena dalam kajian gerakan dan gerakan sosial, karakteristik dan kapabilitas mempengaruhi kepentingan mereka. Selain itu, juga mempengaruhi cara yang mereka tempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

2. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dirancang untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi pilihan upaya yang dilakukan oleh LSM di Kalimantan Selatan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan pilihan upaya tersebut. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian meja dan penelitian lapangan (Wolfer, 2007). Desk research lebih menekankan pada upaya untuk menganalisis fokus masalah penelitian melalui literature review. Sebaliknya, penelitian lapangan merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara langsung dari beberapa sumber melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta pengamatan langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, unit pengambilan sampel adalah anggota sebuah LSM yang memiliki agenda terkait dengan isu pengelolaan lingkungan, yaitu Wahana Lingkungan Lingkungan Indonesia (WALHI).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa sumber yang tepat menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Selain itu, data primer juga diperoleh dari beberapa dokumen penting seperti laporan WALHI dan keterangan resmi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan dari berbagai sumber, seperti; buku, jurnal cetak, media online, buletin yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti catatan lapangan, tape recorder, dan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan situasi, sikap dan pandangan dalam suatu masyarakat, konflik antara dua keadaan atau lebih,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya WALHI Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan kelestarian Pegunungan Karst Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang menjadi titik tekan pembahasan adalah terkait dengan upaya apa yang dipilih oleh WALHI sebagai aktor yang berkepentingan dalam isu kelestarian lingkungan Karst Meratus dan apa yang menyebabkan mereka memilih upaya tersebut.

Untuk itu akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya mengenai strategi WALHI dalam memperjuangkan kelestarian Kawasan Karst Meratus serta faktor apa yang membuat mereka memilih untuk melakukan hal tersebut.

3.1 Strategi WALHI dalam Memperjuangkan Kelestarian Kawasan Karst Meratus

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa upaya WALHI dalam memperjuangkan kelestarian Kawasan Karst Meratus adalah dengan melakukan upaya hukum, melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya Karst serta upaya unjuk rasa.

Beberapa strategi WALHI dalam mengelola perjuangan politik di kawasan Karst Meratus Kalimantan Selatan antara lain dengan melakukan demonstrasi, melakukan focus group discussion (FGD), mengadakan seminar, mengeluarkan press release, dan sosialisasi di lapangan dan media. Wawancara dengan pimpinan WALHI Kalsel telah menempuh berbagai strategi, antara lain diskusi, seminar, pendidikan bersama dengan mahasiswa dan masyarakat setempat, serta penelitian ilmiah terkait ekosistem karst. Secara formal mereka juga aktif menggugat regulasi yang dianggap tidak pro terhadap pelestarian Karst Meratus.

Dari informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, terlihat bahwa WALHI Kalsel aktif menyebarluaskan laporan ilmiah mengenai dampak kerusakan karst terhadap kehidupan masyarakat setempat dan membuat slogan: "Jaga karst, tetap hidup" yang telah menjadi simbol narasi perjuangan mereka. Selain itu, anggota WALHI juga telah melakukan capacity building untuk memperkuat komunitas lokal untuk memastikan komunitas lokal dapat memperjuangkan kepentingannya ketika berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan yang bertujuan untuk mengeksploitasi karst dan merusak ekosistem lokal. Sementara itu,

3.1.1 Jalur Legal Formal

Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan WALHI Kalimantan Selatan, diketahui bahwa WALHI aktif menggugat Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2036 yang dirasa banyak merugikan Kawasan Karst Meratus dan menguntungkan korporasi yang berniat untuk mengeksplorasi kawasan tersebut. Selain itu, WALHI juga mengajukan kasasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 yang diterbitkan pada 4 Desember 2017 yang berisi izin produksi tambang batu bara untuk PT Mantimin. Penambangan Batubara (MCM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan. Kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) pada 15 Oktober 2019 sehingga Mahkamah Agung membatalkan keputusan menteri ESDM tersebut.

Gugatan tersebut didaftarkan WALHI pada 28 Oktober 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Karena hasil PTUN dan PTUN Jakarta memutuskan "Tidak", WALHI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan tersebut tertanggal 15 Oktober 2019. Kisworo dari WALHI Kalimantan Selatan menyatakan: "Keputusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan WALHI merupakan kemenangan bersama bagi rakyat, dan hingga saat ini hampir semua orang di Kalsel mendukung gerakan #SaveMeratus. Perjuangan masih panjang dan akan tetap menjadi milik, apalagi dari total luas 3,7 juta hektare. Kalsel yang 50% sudah terbebani sawit dan izin pertambangan, dan Pegunungan Meratus adalah atap Kalsel yang harus diselamatkan. Pegunungan dari izin pertambangan lainnya" (WALHI, 2020)

3.1.2 Penyebarluasan Informasi Karst dan Sosialisasi

Selanjutnya WALHI juga aktif dalam penyebaran informasi terkait pentingnya Karst dan sosialisasi mengenai eksploitasi Karst Meratus yang telah bertahun-tahun merusak ekosistem Karst Meratus. Misalnya melakukan zoom meeting seminar ekologi yang diselenggarakan bersama Himpunan Mahasiswa Perencanaan Indonesia dengan tema "Pemindahtanganan Lahan dan Krisis Ekologis di Provinsi Kalimantan Selatan" pada Sabtu, 5 Juni 2021.

Kemudian, WALHI juga melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi non formal misalnya dengan berbincang dan berdiskusi dengan masyarakat umum dan mahasiswa terkait pemanfaatan karst. Diskusi informal seperti itu sering kali spontan di mana pun ada kesempatan untuk melakukannya. "Militan" semacam ini dilakukan karena mereka percaya bahwa semakin banyak orang mengetahui fakta tentang eksploitasi karst, semakin banyak orang akan sadar akan dampak negatif yang ditimbulkannya. WALHI mengajak teman-teman

untuk membantu membangun kesadaran kolektif akan isu krusial krisis lingkungan di Kalsel. Seperti kegiatan mengobrol dan berdiskusi pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diadakan pada tanggal 5 Juni 2021. Dalam kegiatan tersebut diadakan acara group viewing dan membahas buku *A Forest for Fortune*.

WALHI hadir dalam acara tersebut untuk memberikan masukan dan diskusi mengenai kebijakan pertambangan di Karst Meratus. Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari WALHI berbagi informasi mengenai data penting terkait #savemeratus di Kalsel. Mereka sepakat bahwa pada kenyataannya, krisis lingkungan semakin parah di Kalsel. Selain itu, mereka menilai pembangunan fisik dan eksploitatif sangat tidak tepat dilaksanakan di Kalsel yang sudah lama merasakan dampak destruktif pembangunan dan industri eksploitatif.

WALHI Kalsel juga menggelar konferensi pers terkait pemantauan restorasi gambut di Kalsel. Kegiatan tersebut dilakukan secara online melalui Zoom. Pada 18 Juni 2020, kegiatan diisi oleh masyarakat dari WALHI Kalsel yaitu Kisworo Dwi Cahyono (Direktur Eksekutif WALHI Kalsel) dan M Jefry Raharjo (Manajer Kampanye WALHI Kalsel). Selain itu, WALHI Kalsel, mereka juga menyampaikan sikapnya melalui siaran pers media dalam beberapa kesempatan. Salah satunya mengutuk tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam aksi unjuk rasa lingkungan dan tuntutan lainnya seperti #savekpk.

Upaya Walhi Kalsel ini juga didukung oleh WALHI pusat yang juga mengkampanyekan #SaveMeratus. Pegunungan Meratus di kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang tidak memiliki tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Upaya masyarakat dan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melindungi wilayahnya dari dampak industri ekstraktif harus diapresiasi dan dihargai oleh pemerintah pusat dan provinsi. Masyarakat Hulu Sungai Tengah telah melihat dampak buruk dari industri ekstraktif di kabupaten tetangga. Mereka tidak ingin daerahnya mengalami hal yang sama dengan kabupaten atau provinsi tetangga yang banyak menelan korban akibat penambangan batu bara.

3.1.3 Unjuk Rasa

Yang terakhir, tidak jarang WALHI melakukan unjuk rasa untuk menuntut perubahan kebijakan Pemda Kalsel dan Pemerintah Indonesia terkait dengan eksploitasi Kawasan Karst Meratus. Adapun beberapa contoh dari unjuk rasa yang mereka lakukan di Kalimantan Selatan antara lain:

3.1.3.1 Unjuk Rasa pada tanggal 23 September 2019 di Lapangan Dwi Warna Barabai, Hulu Sungai Tengah.

Momentum KTT PBB tentang pemogokan iklim atau perubahan iklim dan hari petani nasional menjadi faktor penentu waktu aksi akbar #SaveMeratus di Barabai, Hulu Sungai Tengah. Melalui aksi di Barabai, Kisworo (Direktur WALHI Kalsel) berharap setiap pemimpin negara segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi krisis iklim global. Kisworo menyatakan: "Kalimantan Selatan strategis dalam isu perubahan iklim global karena kita memiliki Pegunungan Meratus yang kontribusinya jelas. Kalsel, misalnya, tidak bisa mengesampingkan peran Meratus,"

Pegunungan Meratus berkontribusi signifikan terhadap air bersih dan udara yang dinikmati masyarakat Kalimantan Selatan. Sayangnya, banyak pihak di Kalsel yang belum memahami peran penting Pegunungan Meratus. Sebagian besar rusak parah di delapan kabupaten di Kalimantan Selatan yang dilalui Pegunungan Meratus akibat penambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang masif. 3,7 juta hektare Kalsel, ia mengklaim 50 persennya terbebani perkebunan sawit dan pertambangan batu bara (Kumparan, 2020).

Dalam demonstrasi tersebut dipaparkan langkah-langkah konkrit untuk penanggulangan bencana, penyelamatan manusia, minimalisasi, dan penanggulangan perubahan iklim. Bentuk tindakannya adalah pidato, sandiwara, seni, puisi, deklarasi, dan pernyataan sikap. Ia pun menyatakan izin pengamanan hingga sore hari, namun karena panas dan masyarakat adat memilih pulang lebih awal karena sedang mempersiapkan acara formal di desanya, sehingga sebagian tidak sempat melihat pertunjukan

3.1.3.2 Unjuk Rasa di Bundaran Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin (September 2019)

Di bundaran Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin juga terjadi aksi unjuk rasa menuntut pencabutan izin pertambangan di kawasan pegunungan Meratus. Hal ini bertujuan untuk melindungi kawasan hutan hujan tropis terakhir di Kalimantan Selatan agar tidak terjamah aktivitas pertambangan.

Mereka meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencabut semua izin pertambangan di wilayah Meratus. Direktur WALHI Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, menjaga kawasan hutan Meratus adalah tugas semua orang karena menurutnya menyelamatkan hutan Meratus sama dengan menyelamatkan banyak orang. (klikkalsel.com, 2020) Pada kesempatan itu, beliau juga menyampaikan bahwa "Meratus ini adalah satu-satunya hutan terakhir di Kalimantan Selatan yang perlu diselamatkan, dan kita patut berterima kasih kepada Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang telah menyuarakan pentingnya menjaga Meratus,"

3.1.3.3 Unjuk Rasa dan pembagian bibit tanaman di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru (5 Juni 2021)

WALHI menggelar aksi damai orasi dan pembagian bibit tanaman di bundaran Simpang Empat Banjarbaru dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah agenda tahunan paling signifikan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya alam dan reboisasi. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Beberapa tuntutan masalah lingkungan kembali disuarakan dalam aksi ini oleh para aktivis lingkungan, antara lain mendesak pemerintah: Cabut revisi UU KPK, Cabut UU Minerba 2020, Hentikan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Korporasi, Jangan Matikan KPK, Cabut Omnibus Law, Darurat Tata Ruang Kalimantan Selatan dan Darurat Bencana Ekologi Kalimantan Selatan (Kanalkalimantan.com, 2020).

Tuntutan kepada pemerintah Kalsel terkait komitmen lingkungan Kalsel kembali digaungkan dari Bundaran Simpang Empat Banjarbaru. Yakni, konsistensi WALHI dalam memerangi penggiat lingkungan #SaveMeratus dan End Coal Mining (EndCoal). Aksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dihadiri oleh pegiat lingkungan dari Yayasan Green Cakrawala Indonesia (YCHI), Lembaga Studi Islam & Sosial (LK3), Lingkaran Hijau Indonesia (LHI), Lembaga Kompas Borneo (LKB), Sumpit Komunitas, Kompas Borneo Unlam, Mapala Gramineia Faperta ULM, Mapala Apache STMIK Banjarbaru, individu anggota WALHI Kalsel, Gema Petani Indonesia Kalsel, Serikat Tani Indonesia Kalsel, dan aktivis lingkungan lainnya. Dalam aksi ini, WALHI Kalsel juga membagikan 350 bibit. Ada 150 biji kopi, 50 biji belimbing, 50 biji jambu mete, 50 biji sirsak, dan 50 biji jambu biji. Bibit kopi dan bibit buah dibagikan langsung kepada masyarakat yang melewati Bundaran Simpang Empat Banjarbaru. (kanalkalimantan.com, 2020)

3.1.3.4 Aksi aktivis lingkungan di Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2018)

Aktivis lingkungan dan warga menggelar aksi penyelamatan Pegunungan Meratus di Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pada 2018. Sejak tiga tahun lalu, gerakan #SaveMeratus yang menggema di Kalsel mulai menggeliat. berbuah. Baru-baru ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan izin operasi produksi salah satu perusahaan yang akan menambang di Pegunungan Meratus. Namun, pembatalan itu tidak membuat Meratus aman. Perjuangan untuk menyelamatkannya masih jauh. Meratus adalah pegunungan yang membelah Kalimantan Selatan menjadi dua. Titik tertinggi di jajaran pegunungan yang memanjang hingga perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan Timur ini terletak di Gunung Halau-Halau. Gunung setinggi 1.901 meter ini terletak di perbatasan tiga kabupaten: Hulu Sungai Tengah.

Di Nateh, yang berjarak 30 kilometer dari Barabai, ibu kota Hulu Sungai Tengah, terletak keindahan Meratus. Sebuah sungai yang jernih dikelilingi oleh perbukitan karst dan hutan yang menghijau. Tak heran jika berbagai destinasi wisata bermunculan. Di antaranya, arung jeram. Maka tak heran jika tempatnya ramai (Jawa pos, 2019).

3.2. Analisis Strategi dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Strategi WALHI

Setelah memaparkan strategi yang ditempuh oleh WALHI Kalsel dalam memperjuangkan penolakannya terhadap eksploitasi kawasan Karst Meratus, pada bagian ini akan dijelaskan pengertian strategi mereka dengan menggunakan perangkat konseptual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep NGO yang memuat pola anatomis NGO serta strategi dan sasaran advokasi NGO, kemudian konsep propaganda sebagai teknik komunikasi dalam politik, kemudian konsep advokasi yang membantu menjelaskan formalitas. proses hukum yang mereka tempuh. Dalam menolak eksploitasi kawasan Karst Meratus.

Yang pertama adalah analisis tipologi strategi dan target advokasinya. Advokasi dilakukan untuk menjamin hak warga negara dalam mengakses sumber daya atau memperoleh peluang dalam pengelolaan karst yang tidak mengorbankan kelestariannya. Advokasi yang dilakukan LSM di Kalsel adalah advokasi kelas untuk mempengaruhi atau melakukan perubahan undang-undang dan kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional. Dalam upaya advokasinya, LSM membentuk koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda serupa.

Strategi advokasi WALHI dalam pengelolaan lingkungan di kawasan karst Meratus adalah melawan pihak-pihak yang dianggap menghalangi kepentingannya, yaitu Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat. Strategi perlawanan mereka adalah memprotes dan menekan masyarakat melalui serangkaian aksi unjuk rasa di Lapangan Dwi Warna, Bundaran Banjarbaru, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin (Depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan), dan di Desa Nateh Hulu Sengai Tengah. Sedangkan target mereka adalah pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, dan pihak korporasi, yang dianggap mencari celah untuk mengambil keuntungan dari eksploitasi kawasan Karst Meratus.

Dalam perjuangannya melawan pemerintah, korporasi dan pihak lain dianggap bertanggung jawab atas pemanfaatan kawasan karst Meratus. Berbagai propaganda mereka lakukan untuk membangkitkan persepsi masyarakat tentang dampak negatif eksploitasi karst. Propaganda berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menancapkan data, ide, atau imajinasi ke dalam benak masyarakat. Siapa yang didorong untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan individu atau kelompok – dalam hal ini masyarakat Indonesia pada umumnya, Kalsel pada khususnya, dan pemerintah Kalsel.

Selanjutnya, pertanyaan mengapa WALHI memilih strategi tersebut? Pemilihan strategi WALHI Kalsel dalam memperjuangkan agenda lingkungan terkait pengelolaan kawasan Karst Meratus dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah struktur organisasi yang mempengaruhi kapabilitas (keuangan, jaringan, sumber daya manusia, pengetahuan). Sedangkan faktor eksternal adalah konteks sosial dan politik di Kalimantan Selatan.

Dari sisi internal, yang paling berpengaruh adalah struktur organisasi yang mereka pilih. WALHI menciptakan struktur organisasi yang fleksibel dan terbuka untuk berkolaborasi dengan LSM lain yang memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Peduli Karst Kalsel (AMPK) merupakan konsekuensi logis yang diturunkan dari kemungkinan kolaborasi dalam menjalankan aksinya. Berikutnya adalah faktor pendanaan. Tindakan yang mereka lakukan tidak terlepas dari faktor pendanaan di masing-masing organisasi. Dengan dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan aktor lain yang terlibat dalam konteks ini (Pemerintah dan Korporasi), strategi seperti demonstrasi, propaganda, dan advokasi adalah instrumen yang dipilih untuk mencapai kepentingan mereka.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemilihan strategi WALHI adalah kondisi sosial politik di Kalimantan Selatan. Secara sosial, masyarakat Kalsel pada umumnya sudah mengetahui bahwa dampak negatif dari eksploitasi alam itu benar adanya. Namun perekonomian Kalsel telah ditopang oleh sektor ekstraktif ini, dan tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat Kalsel yang terbuka terhadap industri ekstraktif eksploitatif. Selain itu, kondisi politik Kalsel juga berpengaruh, dimana pengaruh industri ekstraktif terhadap politik dan politisi Kalsel dianggap biasa dan diketahui masyarakat. Oleh karena itu, demonstrasi, perlawanan, dan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kalsel selalu disuarakan oleh WALHI.

4. SIMPULAN

Studi ini berusaha melihat bagaimana LSM melakukan upaya dan metode untuk melindungi kawasan karst Meratus dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka untuk mengadopsi metode ini. Hal ini menarik karena dalam kajian LSM dan gerakan sosial, karakteristik dan kapabilitas LSM mempengaruhi perumusan kepentingan mereka. Selain itu, juga mempengaruhi bagaimana mereka mencapai tujuan tersebut. Metode dan upaya yang dilakukan sangat beragam, mulai dari metode non-kekerasan hingga konflik fisik.

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam, setidaknya beberapa strategi dapat diidentifikasi sebagai instrumen WALHI dalam memperjuangkan kepentingannya dalam politik pengelolaan kawasan Karst Meratus, yaitu: Upaya hukum, Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi mengenai Karst Meratus dan Unjuk Rasa. WALHI dalam aksinya tidak berjalan sendiri, apalagi dalam aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Aksi mereka mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Karst Kalsel (AMPK). Dalam jaringan AMPK, WALHI tergabung di dalamnya dan organisasi kepemudaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pemilihan strategi WALHI Kalsel dalam memperjuangkan agenda lingkungan terkait pengelolaan kawasan Karst Meratus dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, yang paling berpengaruh adalah struktur organisasi yang mereka pilih. WALHI menciptakan struktur organisasi yang fleksibel dan terbuka untuk berkolaborasi dengan LSM lain yang memiliki tujuan yang sama. Berikutnya adalah faktor pendanaan. Tindakan yang mereka lakukan tidak terlepas dari faktor pendanaan di masing-masing organisasi. Dengan pendanaan yang lebih sedikit dibandingkan aktor lain yang terlibat dalam konteks ini (Pemerintah dan Korporasi), strategi seperti demonstrasi, propaganda, dan advokasi menjadi instrumen yang dipilih untuk mencapai kepentingan mereka.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemilihan strategi WALHI adalah kondisi sosial politik di Kalimantan Selatan. Secara sosial, masih banyak masyarakat Kalsel yang terbuka terhadap industri ekstraktif eksploitatif. Selain itu, kondisi politik Kalsel juga berpengaruh, dimana pengaruh industri ekstraktif terhadap politik dan politisi Kalsel dianggap biasa dan diketahui masyarakat.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya WALHI pun tidak menghentikan kegiatan penambangan di kawasan Karst Meratus, setidaknya mereka berhasil mengangkat masalah ini ke publik yang lebih luas baik di wilayah Kalimantan Selatan maupun di tingkat nasional. Tujuan WALHI untuk menghentikan penambangan dan melestarikan kawasan Karst Meratus harus dimulai dengan langkah-langkah kecil, dan salah satunya adalah mengangkat isu ini ke khalayak yang lebih luas dan memberikan informasi yang komprehensif tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini, antara lain Universitas Lambung Mangkurat (PNBP) selaku penyandang dana penelitian dengan nomor kontrak 009.47/UN8.2/PL/2021, WALHI Kalimantan Selatan, Kabupaten HSS Pemerintah, dan Pemerintah Kalimantan Selatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alemayehu, N. A, et al. I. (2018). "How Environmental NGOs Have Influenced Decision Making in a "Semi-Authoritarian" State: The Case of Forest Policy in Ethiopia," *World Development*, Vol.109, 2018 p.313-322
- Brown, L.D. et al. (2011). *Governing International Advocacy NGOs*. No. 06 Vol. 40. 2011. p.1098-1108
- Charles U. L. (1992). *Persuasion: Reception and Responsibility*. Dalam Antar Venus. Manajemen Kampanye (Kampanye (Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Sosial). 2010. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Definition about Advocacy in http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=advokasi%20adalah&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages.iksmui07.multiply.multiplycontent.com%2Fattachment%2F0%2FRhcPtQoKCokAAG8%40Krg1%2Fhand_out_adv_kebijakan.doc%3Fkey%3DIksmui07%3Ajournal%3A8%26nmid%3D24171283&ei=IolBT8HUKEvJmQXgsvyBw&usq=AFQjCNEml5EahzwsE9rt_6Dx4LMjB9aug&cad=rja, accessed February 11th 2021.
- Hafied Cangara, (2009). *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 334
- Holsti, K.J. (1983). *International Politics*, (diterjemahkan oleh M. Tahir Azhary), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 212.
- Lobbying Versus Advocacy: Legal Definitions, retrieved from <http://www.npaction.org/article/articleview/76/1/248>, accessed February 11th, 2020.
- Nanang Indra Kurniawan, "Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia", *JSP, Fisip UGM*, Vol. 16, No. 1 Juli 2012, h.1-15
- Nimmo, D. (2004). *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 126.
- Oberthur, et al. (2008) in Michele M. Betsill dan Elisabeth Corell, *NGO Diplomacy: The Influence of Non-governmental Organizations in International Relations*, MIT Press, Massachusetts. 2008, p. 4.
- Paripurno, E.T (2017). Kita Ekosistem Karst, Industri Ekstraktif dan Manajemen Resiko Bencana, 2017 dalam, Grita Anindarini Widyaningsih, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia (Studi Kasus: Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, Issue 2, Maret 2017, h. 73-95
- Plano, J.C dan Olton, R (1999). *Kamus Hubungan Internasional* (Diterjemahkan oleh Drs Wawan Juanda), Penerbit Putra Abardin, 1999, hal. 67.
- Rogers E. M., & Storey J. D. (1987). *Communication Campaign*. Dalam C. R. Berger & S.H. Chaffe (Eds.). *Handbook of Communication Science*. New Berry Park: Sage.
- Suharto, E. (2017). *Filosofi dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*, hal 2, dalam situs www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhidAdvokasi.pdf, accessed February 3rd 2020
- Wolfer, L. (2007). *Real Research: Conducting and Evaluating Research in the Social Sciences*, Pearson Education Inc., Boston, 2007.